

Evaluasi Pemberlakuan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dalam Rangka Mendukung Pertanggungjawaban Keuangan Di Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Hilda ^{1*}, M. Agus Cholik ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Email : ¹ hildapolkam56@gmail.com, ² mascholikaja@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Evaluation;
Financial Reporting;
Financial Statements;
HOT-Fit Model

This study aims to analyze and evaluate the implementation of the SAKTI application, identify inhibiting factors, and assess the efforts made to overcome these obstacles and improve the SAKTI system in relation to its implementation in Indonesian Representative Offices abroad under the Ministry of Foreign Affairs. The evaluation employs the Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit) Model, which assesses the human, organizational, and technological aspects of information system implementation. This research utilized a qualitative research method. Data was collected through interviews, observations, and document reviews. Qualitative data analysis was conducted following the method described by Miles and Huberman. This study highlights the contributions of human and organizational factors in enhancing the implementation of SAKTI for the preparation of agency-level financial statements. The findings reveal that the SAKTI application is effective in supporting government accounting and simplifying the financial reporting process at Indonesian Representative Offices abroad under the Ministry of Foreign Affairs.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan harus dapat memenuhi semua kriteria agar tidak menimbulkan kelemahan dalam hal administrasi, efektif, efisien. (Dewi dan Susilowati : 2022) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah media bagi sebuah entitas untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik.

Pembuatan laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan kepada suatu entitas organisasi yang tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dapat memberikan dukungan dalam hal penyajian informasi laporan dan pengambilan keputusan (N. Dewi et al., 2019).

Salah satu bentuk penerapan sistem informasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi, dan informasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E- Government*.

Peraturan tersebut mengatur implementasi penerapan *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan *e-government* salah satu di antaranya yaitu melalui pemanfaatan sistem informasi (Inpres, 2003). Tujuan pemerintah melalui *e-government* ini adalah untuk melayani dan

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam keadaan ini, pemerintah telah secara efektif membuat reformasi di organisasi pemerintah dengan penyampaian layanan melalui teknologi informasi (Entin Indrayani:2020).

Fenomena dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di era digitalisasi, yaitu perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan terutama pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan khususnya dalam penataan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku perpanjangan tangan dari pemerintah dan Bendahara Umum Negara (BUN) berupaya melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi pengelolaan keuangan negara agar lebih akuntabel, transparan, akurat dan efisien. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengembangkan sistem manajemen keuangan publik terpadu atau *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) (Uña & Pimenta, 2016).

Penerapan IFMIS diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat penggunaan sistem yang bersifat manual dalam pengelolaan anggaran. Perbaikan dan perubahan sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tuntutan pelayanan publik sebagai dasar keselarasan perkembangan teknologi informasi. Penerapan IFMIS dapat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan pengurangan biaya melalui digitalisasi pengelolaan keuangan.

Indonesia sudah mulai mengembangkan Core Financial Management Information System (FMIS), dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai core-nya. Namun masih perlu banyak pengembangan untuk menjadi IFMIS yang andal dan sesuai *trend* terkini (Sudarto, 2019).

Sebagai implementasi pelaksanaan dan pengembangan IFMIS atas pengembangan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Kementerian Keuangan RI mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi diperuntukkan untuk seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019).

Sistem ini dapat mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. Aplikasi pengelolaan keuangan negara yang belum terintegrasi tersebut meliputi : Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKAKL DIPA); Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS); dan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

Aplikasi tersebut menggunakan *databased* terpisah-pisah yang dapat menimbulkan pengulangan dan duplikasi *data entry* sehingga informasi keuangan yang dihasilkan pun tidak akurat. Awal pelaksanaan, aplikasi SAKTI dipayungi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, program SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan piloting 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN (Mukhtaromin, 2018).

Perlu diperhatikan penelitian yang dikembangkan oleh (Novelia, 2023) menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, penggunaan SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya response time dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna.

Dengan adanya implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan, oleh karena itu diperlukan upaya sistematis agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah pada aplikasi SAKTI antara lain yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI pada tahap piloting awal. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasrudin & Widagdo, 2020) menyatakan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan

dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, serta masalah-masalah lainnya.

Pelaksanaan SAKTI diawali dengan tahapan uji coba terbatas (piloting) mulai tahun 2015 dan secara mandatory dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Mulai tahun 2022, dengan berpedoman pada Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), seluruh satuan kerja di Kementerian/Lembaga termasuk Satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diharuskan menggunakan aplikasi SAKTI.

Sebelum SAKTI ini diberlakukan, Kementerian Luar Negeri dan Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri menggunakan aplikasi SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui <https://simkeu.kemlu.go.id>. Aplikasi SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) merupakan aplikasi keuangan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri sebagai aplikasi pendamping untuk melakukan transaksi keuangan spesifik yang dikelola oleh pengelola keuangan yang belum dapat diakomodir pada aplikasi SAKTI.

Mencermati SAKTI yang belum dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di Kementerian Luar Negeri dan Satuan Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, karena adanya fitur yang belum dapat diakomodir pada aplikasi SAKTI. Fitur yang belum dapat diakomodasi tersebut yaitu transaksi pembukuan di Perwakilan RI di Luar Negeri antara lain (1) penukaran uang dari mata uang *United State Dollar (USD)* ke dalam mata uang negara setempat (kurang lebih 82 jenis mata uang eksotik), (2) *upload* tanda bukti pengeluaran dan penerimaan dari transaksi yang telah dibukukan pengelola keuangan. Upload bukti data dukung ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan sebagai bentuk bukti pertanggungjawaban keuangan, monitoring dan pengawasan anggaran, dan alat pembuktian dalam pemeriksaan.

Kendala lain yang dihadapi saat ini oleh Satuan Kerja Perwakilan di Luar Negeri dalam pengelolaan keuangannya antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri untuk mengoperasikan dua aplikasi (SIMKEU dan SAKTI), proses siklus pengelolaan uang persediaan (UP) yang perlu disesuaikan pada SAKTI existing, duplikasi pelaporan keuangan karena terdapat dua sumber aplikasi (SIMKEU dan SAKTI), penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ) yang masih manual, akurasi transaksi keuangan yang masih perlu ditingkatkan akibat pengelolaan dari dua sistem informasi (SIMKEU-SAKTI). Kondisi ini menghambat keterpaduan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perwakilan Luar Negeri karena informasi yang diperlukan untuk tahapan selanjutnya menjadi sulit diakses.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2023, telah dilakukan kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perwakilan Luar Negeri salah satunya dengan meniterkoneksikan dan menintegrasikan aplikasi SIMKEU dan SAKTI. engan adanya implementasi pengembangan aplikasi SAKTI dengan interkoneksi dan integrasi, diharapkan dapat dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan di masa datang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas pengelolaan keuangan setelah pemberlakuan SAKTI dalam mendukung pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, peneliti akan membahas hambatan yang terjadi serta Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Moleong, 2021). Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi/organisasi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif evaluasi yang cenderung menggunakan analisis yang mendalam dimana proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian ini memiliki landasan teori

yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan evaluasi pada sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik (Joana : 2022). Evaluasi penelitian menggunakan Model *Human-Organization-Technology Fit* (HOT-Fit), yang menilai aspek manusia, organisasi, dan teknologi serta manfaat dari implementasi sistem informasi SAKTI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi SAKTI dirancang untuk memudahkan Penata Kanselerai dan juga Staf Operator di Bagian Keuangan dan Bagian Pengelolaan Barang Persediaan/ Barang Milik Negara. Secara umum, SAKTI telah menunjukkan efektivitas dan kesesuaian antar aspek yang mempengaruhi adopsi sistem secara keseluruhan. dalam mempertanggungjawabkan keuangan pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Sesuai dengan model evaluasi *HOT-Fit*, menunjukkan bahwa kontribusi aspek manusia dan organisasi, mampu meningkatkan efektivitas dalam proses penyusunan laporan keuangan UAKPA pada satuan kerja di satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia. Laporan Keuangan yang disusun telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan sistem akuntansi pelaporan keuangan instansi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022.

Dengan antarmuka *user-friendly*, otomatisasi proses pertanggungjawaban keuangan, dan integrasi antar modul yang baik, aplikasi SAKTI dinilai telah memenuhi ekspektasi pengguna sehingga kinerja individu meningkat. Pengguna (*user*) merasa puas menggunakan aplikasi SAKTI dengan fitur aplikasi yang mudah dipahami dan dipelajari sesuai dengan ekspektasi.

Dengan kata lain, dipastikan bahwa pemberlakuan aplikasi SAKTI pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dikatakan bekerja lebih baik sesuai dengan ekspektasi pengguna dibandingkan dengan aplikasi pengelolaan keuangan sebelum menggunakan aplikasi SAKTI. Pengguna (*user*) percaya dan memiliki harapan besar aplikasi SAKTI dapat terus dikembangkan dan disempurnakan ke depan serta mampu menjadi sistem dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang handal dan akuntabel.

Sesuai dengan teori model evaluasi *HOT-Fit* pada aspek manusia (*human*), kemampuan sumber daya manusia pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pembuatan dan pengiriman Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan.

Laporan Keuangan yang dibuat oleh satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan Laporan Keuangan tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang milik negara. Data laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan sub-sun laporan transaksi yang diperoleh dari aplikasi SAKTI.

Dalam mencaermati evaluasi berdasarkan aspek manusia sebagai pengguna (*user*), pimpinan satker mendukung pemberlakuan SAKTI sepanjang operator dapat dioperasikan dengan baik dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel sesuai instruksi Pusat (Kementerian Luar Negeri). SAKTI dapat diadopsi dan digunakan secara optimal melalui penyediaan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan teknis dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembuatan dan pengiriman laporan keuangan mengambil sejumlah 13 sampel dari 113 satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri c.q Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan, secara umum penyajian laporan keuangan telah mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022.

Laporan Keuangan yang dikirim harus *diupload* pada link KPPN. Laporan keuangan ini dikirim dan dicetak secara digital, dilampirkan dengan data dukung pelaporan transaksi dari aplikasi SAKTI. Dari Penilaian pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tersebut dinilai *hard competency*

pegawai / *user* operator dalam hal penggunaan SAKTI dapat dikatakan sudah efektif dan telah memenuhi standar profesionalitas.

Evaluasi SAKTI berdasarkan model HOT-Fit menekankan pada kesesuaian (*fit*) antara manusia-organisasi-teknologi untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pendopsian sistem. Konsep *benefit* diukur dan dianalisa dari kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara ketiga aspek tersebut.

Kesesuaian antara manusia, organisasi dan teknologi memudahkan proses transisi dari sistem lama ke sistem yang baru. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas sistem yang baik, dibarengi dengan individu yang kompeten, kolaborasi dan kerja sama yang baik dalam organisasi, serta adanya dukungan pimpinan, berdampak pada implementasi SAKTI yang berjalan dengan baik.

Penyerapan SAKTI juga disumbangkan oleh penerimaan dan kepribadian pengguna (sikap dan perilaku) yang kuat untuk belajar dan menggunakan sistem secara optimal. Upaya mandiri dilakukan oleh pegawai atau staf operator SAKTI dengan mempelajari video penggunaan aplikasi atau petunjuk teknis penggunaan sesuai dengan modul SAKTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Kesesuaian antar manusia dan teknologi, dan adanya dukungan yang baik dari pihak pengelola SAKTI, juga meningkatkan penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Penerimaan SAKTI juga dilakukan melalui kegiatan koordinasi dengan merangkul satuan kerja internal dan eksternal diluar organisasi. Kegiatan dilakukan secara aktif dengan fasilitasi yang diberikan sesuai dengan terhadap kebutuhan satuan kerja.

Penerapan SAKTI dalam aspek organisasi dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penerapan ini memiliki dampak baik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi seperti pembiayaan, peraturan pemerintahan, politik, lokalisasi, kompetisi, dan hubungan seluruh pengguna yang terkait dengan aplikasi. Sedangkan dalam lingkup struktur mengacu pada perencanaan, strategi, pengelolaan, otonomi, komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan dan manajemen.

SAKTI membutuhkan kerja sama tim yang lebih luas bukan hanya dalam *scope* lingkungan satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri saja. Hal ini dikarenakan SAKTI mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan negara dari hulu hingga hilir. Misalnya dalam menentukan perencanaan anggaran, bagian yang mengurus perencanaan anggaran tidak bisa bekerja sendiri, harus saling berkoordinasi dengan bagian lainnya. Terutama dalam hal penentuan akun belanja dalam penyusunan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL). Pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan akun belanja yang ditentukan pada masa penyusunan penganggaran. Dengan demikian, keterlibatan pengguna dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak yang terlibat dibutuhkan untuk kelancaran penggunaan sistem.

Peneliti melihat dengan adanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi lingkungan kerja yang baik, dukungan pimpinan dan dukungan antar sesama pengguna, memudahkan implementasi SAKTI pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Operator modul keuangan dan barang persediaan atau asset dalam menyusun laporan keuangan tidak *struggle* seorang diri sehingga proses adaptasi akibat mutasi atau rotasi dapat dengan lebih mudah dijalani. Selain itu dengan adanya koordinasi dengan lingkungan eksternal, organisasi telah mampu menjalin komunikasi yang proaktif. Misalnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola SAKTI. Komunikasi eksternal ini berjalan efektif dan meningkatkan keberhasilan dalam implementasi SAKTI.

SAKTI yang merupakan sistem aplikasi keuangan terintegrasi, dimana seluruh transaksi keuangan ditempatkan dalam satu *database* terpusat. Komunikasi internal dan kerjasama tim dilakukan dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim. Sehingga semua aspek implementasi SAKTI terkelola dengan baik dan membuat jalur komunikasi yang jelas, seperti *grup chat* untuk memudahkan pertukaran informasi dan memudahkan komunikasi di antara para pengguna modul.

Komunikasi lainnya untuk mengatasi kendala akses SAKTI dapat dilakukan *via aplikasi* MON SAKTI atau dengan aplikasi HAI (*Help, Answer and Improve*) DJP. Sebagai contoh dalam melakukan

rekonsiliasi (pencocokan) realisasi belanja, ketika ditemukan perbedaan angka dalam sistem, perbedaan tersebut kemudian ditelusuri dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian, komunikasi antar masing-masing pengelola modul SAKTI dan penyusun laporan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan perannya masing-masing.

Output data keuangan yang dihasilkan oleh SAKTI, telah lengkap dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang dihasilkan dalam aplikasi SAKTI sangat dibutuhkan (*relevan*) dalam proses penyusunan laporan keuangan. SAKTI dapat menghasilkan berbagai laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Laporan yang dihasilkan mencakup semua aspek keuangan dan dirancang untuk memenuhi persyaratan regulasi dan audit. Dengan menggunakan SAKTI penyusun laporan keuangan hanya perlu membuka satu aplikasi untuk mendapatkan akses terhadap data transaksi dan laporan keuangan yang dibutuhkan.

Ketidakakuratan data yang ada pada aplikasi sistem informasi sebelumnya dapat saja terjadi karena kegagalan dalam penerapan sistem. Oleh sebab itulah SAKTI sebagai aplikasi keuangan secara integrasi diberlakukan. Adanya proses impor Arsip Data Komputer (ADK) pada tahapan pengiriman data transaksi setiap aplikasi pada aplikasi sebelum aplikasi SAKTI ini diberlakukan dapat saja menimbulkan faktor kegagalan pada sistem itu sendiri

Meskipun pada awal pemberlakuan implementasi SAKTI mengalami kendala, namun efisiensi dan efektivitas pengguna meningkat. Pengguna tidak harus melakukan pekerjaan proses impor data transaksi (ADK) dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dilakukan dengan mengirimkan data dari SAKTI ke OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) sebagai monitoring dan meminimalisir kesalahan pelaporan, sehingga kesalahan dapat terdeteksi lebih awal dengan demikian SAKTI bermanfaat saat menyusun laporan keuangan

Ketika menggunakan SAKTI sifatnya yang *real-time* dan integritas, tahapan tersebut dieleminasi sehingga dari sisi kerangka konseptual pelaporan keuangan data laporan keuangan menjadi akurat, lebih bebas dari kesalahan karena transaksi tidak boleh ada kesalahan apapun. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Terkait peraturan penyusunan laporan keuangan, data transaksi keuangan yang diinput pada aplikasi SAKTI. Data transaksi ini secara langsung dapat membentuk jurnal secara otomatis dan apabila jurnal dalam aplikasi SAKTI belum terbentuk, dapat dilakukan peninjauan jurnal secara manual untuk menambahkan dan mengoreksi apabila ada kesalahan dalam penjurnalan.

Sesuai dengan pedoman akuntansi laporan keuangan berbasis akrual, pada SAKTI diterapkan penutupan periode yaitu periode 13 untuk laporan keuangan yang belum diaudit dan periode 14 untuk laporan keuangan yang telah diaudit. Penutupan periode ini menghasilkan konsistensi laporan keuangan yang telah diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) tidak dapat dilakukan perubahan data setelahnya. Apabila dibutuhkan penyesuaian, maka pengguna harus mencatat jurnal koreksi. Sehingga, validitas dari setiap transaksi yang ada dapat terjamin.

Berbagai tanggapan yang diberikan oleh partisipan, penulis menilai tanggapan positif diberikan terkait dengan kemudahan penggunaan (*ease of use*) SAKTI partisipan mencakup mudah digunakan, data yang lebih mudah diakses, bisa kapan dan dimana saja. Data dapat diakses dari perangkat manapun yang terkoneksi internet, *realtime*, serta terintegrasi dalam *single database* dan berbasis *web*. Aplikasi SAKTI dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan karena banyak proses yang sebelumnya manual kini otomatis.

Selain itu, aplikasi SAKTI dinilai dapat memantau realisasi anggaran dan status keuangan yang mempercepat pembuatan keputusan dan pengendalian anggaran. Kemudahan pengguna (*ease of use*) oleh pengguna (*user*) diungkapkan oleh partisipan yang telah memiliki pengetahuan *user* yang telah dan keterampilan, serta berpengalaman menggunakan aplikasi sistem sebelumnya. Disisi lain tanggapan negatif, SAKTI mudah dipahami namun tidak efisien. Aplikasi masih disekat dengan

banyaknya langkah-langkah dan birokrasi yang bisa lebih disederhanakan, sehingga lebih efisien dalam segi waktu pengerjaan. Langkah birokrasi dimaksud yaitu proses *validasi* transaksi pada aplikasi SAKTI dengan meminta OTP (*on time password*) yang dilakukan secara berjenjang.

Pemintaan OTP dimulai dari *user validator* (Pejabat Pembuat Komitmen) kemudian naik ke jenjang *level user approver* (Kuasa Pengguna Anggaran) sehingga memerlukan waktu dalam pengerjaan pembuatan pertanggungjawaban keuangan. Langkah validasi dan permintaan OTP yang dilakukan melalui *whatsapp* atau *email* yang masuk via telepon gengam atau alamat *email* masing-masing *user*. Adanya OTP ini dilakukan sebagai upaya untuk memantau realisasi anggaran, kebenaran pembebanan belanja sesuai dengan badan akun standart dan pengendalian anggaran untuk memenuhi persyaratan regulasi dan audit.

Kualitas layanan SAKTI dapat dilihat dari keterlibatan penyedia atau pengelola sistem informasi. Kualitas layanan ini mencakup layanan aplikasi atau sistem, respon melayani dan tindak lanjut layanan yang diberikan oleh pihak pengelola SAKTI. Pihak pengelola SAKTI telah dapat memberikan pelayanan dengan baik dalam menanggapi penyelesaian kendala yang dialami pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Namun demikian dalam menanggapi penyelesaian kendala ini, pelayanan yang dilakukan hanya dikendalikan oleh beberapa orang. Sehingga koordinasi membutuhkan waktu yang agak lama, oleh karena itu dapat menghambat pekerjaan dan tidak efisien.

Kendala dan permasalahan lainnya tentang kualitas layanan dalam implementasi SAKTI di Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri biasanya terkait dengan konektivitas internet, gangguan jaringan dan seringkali *maintenance*. Penyebabnya seringkali adalah *server* dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola SAKTI, kemungkinan *bandwith* yang terbatas tidak mampu menangani beban *server* ketika seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga secara bersama-sama mengakses SAKTI secara bersamaan.

Upaya mengatasi kendala diatas, dilakukan dengan menghubungi tim dukungan teknis atau *helpdesk* SAKTI untuk melaporkan masalah yang terjadi. Pengguna (*user*) meinformasikan masalah atau kendala yang terjadi kepada atasan langsung (pemangku kepentingan pimpinan dan pengguna lain) mengenai dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan mengatasinya.

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan layanan dari pihak pengelola. Pengguna dapat memanfaatkan *contact center* Kementerian Keuangan, yang dapat diakses melalui laman www.hai.kemenkeu.go.id atau dapat datang dan bertanya langsung kepada *Customer Service Officer* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pengaduan permasalahan disampaikan dengan menggunakan aplikasi HAI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (*Help, Answer and Improve*) melauai *chat* dengan membuat tiket pertanyaan. Setelah pembuatan tiket pertanyaan, kemudian permasalahan akan diteruskan ke unit atau bidang terkait untuk mendapatkan solusi.

Gambar I : Pelayanan HAI DJP



Cara lain yang biasanya dianggap paling cepat untuk mendapatkan respon atas permasalahan yang ada, terkait dengan adanya kendala teknis adalah dengan menghubungi secara langsung staf Dit.SITP melalui jaringan pribadi (*Person in Charge*) masing-masing desk Satuan Kerja. Opsi tersebut dipilih karena seringkali solusi dari *contact center* maupun KPPN, membutuhkan waktu respon yang relative lama.

Evaluasi SAKTI yang dilakukan dengan metode HOT-Fit, memberikan manfaat atau *benefit* dalam bentuk timbal balik baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Atas terlaksananya implementasi SAKTI pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan manfaat bagi pengguna maupun organisasi. Manfaat positif juga dirasakan oleh pengguna sebagai kesatuan dari aspek manusia, organisasi dan teknologi.

Manfaat lain atas implementasi SAKTI pada satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah pada proses penyusunan pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan. SAKTI jika dibandingkan dengan aplikasi yang digunakan sebelumnya, dinilai dapat meningkatkan kinerja performa organisasi dan telah sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sekarang ini SAKTI dengan sistem data terintegrasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. SAKTI menghasilkan laporan dan data informasi yang *real-time*. Proses rekonsiliasi (pencocokan data) secara otomatis langsung melalui aplikasi SAKTI, bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas pengguna sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien.

Efisiensi pekerjaan dengan menggunakan SAKTI tidak perlu menunggu atau membutuhkan orang lain dalam mengecek data transaksi. Penata Kanselerai pada satker Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat mengakses dan lebih cepat dalam membuka data yang diperlukan misalnya laporan realisasi keuangan.

Penelusuran data yang diperlukan dalam laporan keuangan dengan menggunakan SAKTI, menjadikan beban kerja menjadi berkurang. Modul pada SAKTI mewajibkan pengguna untuk dapat mengakses dengan *username* dan *password* yang telah didaftarkan di KPPN. Dengan demikian masing-masing *user* bertanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sebagai contoh sebelumnya, sebelum penggunaan SAKTI, seorang pengguna pada *user operator*, dalam membuat pertanggungjawaban keuangan, merangkap sebagai operator modul pelaporan keuangan. Misalnya dalam melakukan input terhadap transaksi pengembalian belanja, realisasi belanja dan transaksi atas penyeteroran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Kini, hal tersebut menjadi tugas Bendahara/operator modul Bendahara.

Tidak ada perbedaan terkait proses bisnis dari mulai proses perencanaan sampai dengan pelaporan menggunakan SAKTI dengan aplikasi sebelumnya. Dalam penyusunan laporan keuangan masih disusun secara manual dengan memasukkan nilai atau angka perbedaan/penurunan/kenaikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penggunaan SAKTI berbasis *web* memerlukan koneksi internet yang stabil. Di beberapa lokasi, terutama yang jauh dari pusat kota atau di luar negeri. Konektivitas internet yang kurang memadai dapat menghambat akses dan penggunaan aplikasi. Seringkali terdapat adanya *bug* atau gangguan dalam aplikasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam peinputan data. Hal ini dapat menghambat proses kerja, atau bahkan membuat aplikasi tidak dapat digunakan sementara waktu.

SAKTI menjadi susah diakses apabila sedang digunakan secara bersamaan, terutama apabila terdapat *dateline* pekerjaan. Aplikasi menjadi melambat bahkan tidak bisa dibuka (*log in*). Begitu juga kendala yang sering terjadi pada awal di berlakukannya interkoneksi SIMKEU-SAKTI. *Update* penarikan data dari *Online Monitoring SPAN* seringkali terhambat karena adanya *maintenance* dan proses koneksi data pada SIMKEU-SAKTI.

Karena SAKTI mengadopsi sistem akuntansi keuangan dengan metode akrual maka apabila akan melakukan revisi anggaran DIPA dengan menggunakan aplikasi SAKTI, terlihat pada cetak laporan sisa anggaran anggarannya masih ada namun demikian secara pagu anggaran tidak mencukupi dan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran. Dengan demikian, Bendahara Perwakilan harus betul-betul menghitung realisasi anggaran atau pengeluaran belanja anggaran sehingga tidak ada pagu anggaran minus dan ketekoran kas.

Penggunaan aplikasi SAKTI pada satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, dinilai masih terdapat kekurangan dalam sistem. Yaitu belum mengakomodirnya proses bisnis yang *discover* atau dilakukan oleh SIMKEU. Proses bisnis tersebut yaitu *upload* berkas transaksi pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja (nota dinas, memo, faktur atau kuitansi) dan transaksi penukaran uang dari valuta USD ke valuta setempat. Oleh karena itu masih perlunya aplikasi pendamping SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri.

Penambahan fitur *upload* data dukung transaksi pada aplikasi SAKTI belum secara urgensi dilakukan. Apabila dilakukan perbandingan aplikasi SAKTI yang digunakan di dalam negeri, secara umum tidak terdapat fitur *upload* data dukung. Data dukung pertanggungjawaban yang dihasilkan dari aplikasi yang dikirimkan melalui Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu Surat Perintah Bayar (Spby) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) merupakan bentuk penyederhanaan kuitansi dianggap sebagai bukti dukung yang sah.

Penatausahaan dan penyimpanan bukti fisik atau kuitansi pengeluaran belanja yang telah dibayarkan oleh Bendahara, mekanisme penyimpanan dan penatausahaan dilakukan dan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat komitmen masing-masing satuan kerja. Dengan penyederhanaan proses penerbitan dokumen keuangan yang dapat dicetak melalui SAKTI, beranggapan Pejabat Pembuat Komitmen telah secara sadar dan bertanggungjawab atas pengeluaran yang telah tervalidasi.

Untuk saat ini ruang penyimpanan yang harus disediakan untuk men *upload* data dukung pertanggungjawaban keuangan pada penyimpanan server SIMKEU di Kementerian Luar Negeri setiap bulannya. Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana *server* penyimpanan data dukung pada *server* pada masing-masing pengelola aplikasi SIMKEU diperlukan alternatif cara atau aplikasi penyimpanan data k(uangan yang selaras dengan peraturan, kebijakan dan pengamanan atas data tersebut.

Perbaikan dan pengembangan pada aplikasi SAKTI penting untuk dilakukan agar kendala-kendala dalam penggunaan sistem dapat teratasi. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan bukan saja pada satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri akan tetapi pada seluruh instansi pemerintah agar tetap dapat terjaga dengan baik.

Dengan meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti memperbarui perangkat keras dan meningkatkan koneksi internet, untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Secara aktif melaporkan *bug* dan masalah teknis kepada tim pengembang SAKTI untuk mendapatkan solusi cepat dan memastikan pembaruan sistem dan keamanan data serta informasi yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan setelah implementasi SAKTI dalam mendukung pertanggungjawaban keuangan telah menunjukkan efektivitas dan kesesuaian antar aspek yang mempengaruhi penggunaan aplikasi SAKTI secara keseluruhan. Sesuai dengan model evaluasi HOT-Fit, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi aspek manusia dan teknologi telah mampu meningkatkan efektivitas teknologi SAKTI dalam proses penyusunan laporan keuangan UAKPA pada satuan kerja di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi efektif dan efisien sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Masih terdapat sejumlah kendala atau penghambat yang dapat mengurangi efektivitas pada sistem SAKTI seperti adanya *bug*, seringkali dilakukan *maintenance* pada system, konektivitas dari pengambilan data (lama loading) dan hal teknis lainnya. Walaupun diawal

implementasi SAKTI, fungsi sistem masih belum siap sepenuhnya namun sikap responsif dari pengelola SAKTI sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pengguna.

Upaya yang dilakukan terhadap kendala yaitu dengan melakukan perbaikan dan pengembangan sistem SAKTI. Upaya ini telah dilakukan sejak awal SAKTI diberlakukan sepanjang tahun anggaran berjalan untuk mengakomodir kebutuhan dan operasional organisasi. Wujud dari perbaikan dan pengembangan dilakukan melalui interkoneksi SAKTI-SIMKEU. Dengan adanya Interkoneksi SAKTI-SIMKEU user tidak perlu memasukan data transaksi secara double entry pada SAKTI. Pihak dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri masih melakukan pembahasan pengembangan dan perbaikan kualitas sistem SAKTI. Yaitu pengembangan pembuatan Modul Bendahara yang khusus dipakai oleh Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Perwakilan RI di Luar Negeri. Dengan demikian, secara positif SAKTI dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang handal di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambiyar, M.Pd, Metodologi Evaluasi Program, (2019). (n.p.): Alfabeta. Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49.
- [2] Alter, S. (2008). Information Systems: A Foundation for the Digital Age. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
- [3] Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerahdi Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia. Peraturan Pemerintah
- [4] Braa, J., Hlupic, V., & Kouba, Z. (2004). Information Systems Management: Theory and Practice. Prague: Informatorium.
- [5] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th Edition). SAGE Publications, Inc.
- [6] Christian Bueger (2015) Manajemen Jakarta, PT. Prenhalindo, Edisi ke 6.
- [7] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30,
- [8] Dewa Gede Hendra Divayana (2018), Evaluasi Program: Konsep Dasar dan Peimplementasiannya PT. Raja Grafindo Persada
- [9] Duncan (Steers 2015) Manajemen efektivitas (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Jakarta : Mitra Wacana Media
- [10] Elin Indrayani (2016), E- Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- [11] Erwin, A. E., Prawirosumarto, B. S., & Purwanto, A. H. (2024). Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: CV Pustaka Cendekia Cipta
- [12] Islamia,ni Safitri et.al (2024), Teori Pengukuran Dan Evaluasi, CV. Ruang Tentor
- [13] Joko Tri Nugraha et al (2023), E-Government Dalam Prespektif Pengguna: Konsep, Teori dan Perkembangannya, Stilletto Book Yogyakarta
- [14] Kavanagh, M. J., & Johnson, W. R. (2020). Management Information Systems: Managing Digital Organizations (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
- [15] Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Mega Press Nusantara
- [16] Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). Management Information Systems: Managing the Digital Future (17th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall

- [17] McLeod, M. A. (1983). *Management Information Systems: A Critical Analysis*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- [18] Fauziah, Ifat. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Ilmu. Jakarta
- [19] J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- [20] Keown, A.J. (2010). *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan*, Edisi Kesepuluh, Jilid 2. PT. Indeks. Jakarta
- [21] Nugraha, J. T., Achmad, T., Warsono, H., & Yuningsih, T. (2023). *E- Government dalam Perspektif Pengguna: Konsep, Teori, dan Perkembangannya*. Stiletto Book.
- [22] O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). *Management Information Systems: Managing Technology in a Global Economy* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
- [23] Pearlson, K. E., Saunders, C. S., & Galliers, R. D. (2024). *Strategic Information Systems Management: Transforming Organizations in the Digital Age*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- [24] Rudini, *Sistem Informasi Manajemen* (2024), CV Azka Pustaka
- [25] Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [26] Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, M. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Penerbit : Literasi Media Publishing, Sleman, Yogyakarta.
- [27] Silitonga, H. S., Purwanto, A. H., & Wibowo, A. (2024). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Pustaka Cendekia Cipta
- [28] Soares, A. P., Teixeira, R. M., & Gomes, A. I. (2022). The Role of Management Information Systems in Strategic Planning: A Systematic Literature Review. *Journal of Information Systems Management*, 39(3), 235-255.
- [29] Tawar, Santoso, A. F., & Salma, Y. S. (2022). Model HOT Fit dalam manajemen sistem informasi. *Bincang Sains Dan Teknologi*, 1(02), 76–82.
- [30] Wardana, L. W. (2021). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Pustaka Cendekia Cipta.
- [31] Yarbrough D. B., Shula L. M., Hopson R. K., Caruthers F. A. (2010). *The program evaluation standards : a guide for evaluators and evaluation users* (3rd. ed). Corwin Press.
- [32] Yusof, M.M., Paul R. J., Stergioulas L. K. (2006). *Towards a Framework for Health Information System Evaluation*. *Proceeding of the 39th Hawaii International Conference on System*.
- [33] Yusof, M. M., & Yusuff, A. Y. A. (2013). Evaluating E-government system effectiveness using an integrated socio-technical and fit approach. *Information Technology Journal*, 12(5), 894–906.
- [34] Zainal Arifin (2012), *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Jurnal – Jurnal

- [1] -,182 *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 3, November 2016, Halaman 178 – 183
- [2] Amtiran and Molidya/, *Pengelolaan Keuangan Negara*, *Journal Of Management (SME's)* Vol. 12, No.2, 2020, p203-214
- [3] Askuba, A. D. (2018). Pengukuran atas penerapan sistem informasi perhotelan bluefish menggunakan extended Human Organization Technology (HOT) FIT model (studi kasus: PT

- Karmanta Wijaya Sakti) (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)].
- [4] Diamond, J., dan Khemani, P. (2005). IMF working papper: Introduction financial management information system in developing countries. International Monetary Fund
- [5] Djohan, Y. D. (2021). Analisis Penerimaan Learning Management System Pada Kuliah. itk. ac. id Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Kalimantan).
- [6] Edy Nasrudi dkk, Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi, Jurnal Ilmiah
- [7] Handayani, F., Fauziah, S., Afandi, A., & Suwarno, C. A. (2021). SAKTI : Innovation on Digitizing State Financial Management Web-Based in Indonesia. HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings), 2(1), 201–216
- [8] Krisbiantoro, D., Suyanto, M., & Luthfi, E. T. 2015. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Dengan Pendekatan Hot Fit Model (Studi Kasus: Perpustakaan Stmik Amikom Purwokerto). Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 STMIK STIKOM Bali, 9 – 10 Oktober 2015
- [9] Logachev, A. A., Kiselev, A. A., & Kiselev, I. A. (2022). The Role of Management Information Systems in Management Control. International Journal of Economics and Financial Issues, 12(3),
- [10] Muhimmah, I. (2013). Evaluasi Faktor-Faktor Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit di PKU Muhammadiyah Sruweng dengan Menggunakan Metode Hot-Fit. In Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed)
- [11] Pranata, Z. A. Analysis of the Influence of Application Functions, Usability, and Perceived Benefits to Customer Satisfaction Shopee Online Shop in YOGYAKARTA. Jurnal Ekobis Dewantara, 2(2), 46-62
- [12] Rozanda, N., & Masriana, A. (2017). Perbandingan Metode Hot Fit Dan Tam Dalam Mengevaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). In Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri (pp. 327-336).
- [13] Sudarto, S. (2019). Pengembangan integrated financial management information system (IFMIS) di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 87–103.

Website

- [1] <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kediri/id/data-publikasi/berita-terbaru/2850-seandainya-pengelolaan-keuangan-negara-semudah-mengelola-keuangan-rumah-tangga.html> diakses tanggal 10 Mei 2024
- [2] <https://www.ksap.org/sap/profil-ksap/> diakse tanggal 19 Mei 2024

Peraturan-Peraturan

- [1] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- [3] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- [4] Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

- [5] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.05/2018 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri`
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
- [11] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
- [12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.